

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pemuda melalui Penguatan Akuntabilitas Keuangan BUMDes

Muhammad Husni<sup>1\*</sup>, Rafie Akbar Sumarno<sup>2</sup>, Haris Reza Fathony<sup>3</sup>, Anto Andreawan<sup>4</sup>, M. Fahriyal Aldi<sup>5</sup>, Memey Ifalia Kristin<sup>6</sup>, Rapy Ahmad Nazriel<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Politeknik Negeri Tanah Laut, Jl. Ahmad Yani No.Km.06, Pemuda, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia.

E-mail: [muhammadhusni@politala.ac.id](mailto:muhammadhusni@politala.ac.id)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3167>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history

Received: 18 Oct 2025

Revised: 24 Oct 2025

Accepted: 30 Oct 2025

#### Kata Kunci:

BUMDes, Akuntabilitas Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Desa, Partisipasi, Pendampingan.

#### Keywords:

*BUMDes, Financial Accountability, Village Economic Empowerment, Participation, Mentoring.*



Penguatan akuntabilitas keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kunci dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penelitian pengabdian ini dilaksanakan di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari. dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan learning by doing, sehingga peserta tidak hanya memperoleh materi teori, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu: (1) persiapan dan asesmen awal, (2) pelatihan dan pendampingan, serta (3) evaluasi dan tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam akuntansi dasar, manajemen kas, dan penyusunan laporan keuangan, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pendampingan ini memperkuat kelembagaan BUMDes sebagai instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan pelatihan rutin, digitalisasi sistem laporan keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan dukungan regulasi dari pemerintah desa dan lembaga terkait.

*Strengthening the financial accountability of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is key to enhancing rural community economic empowerment. This community service research was conducted in Desa Pemuda, Pelaihari Subdistrict. aiming to improve the capacity of BUMDes administrators in managing finances transparently and accountably. The activity applied a participatory approach and learning by doing, allowing participants not only to receive theoretical knowledge but also to engage directly in transaction recording and financial reporting practices. The implementation consisted of three main stages: (1) preparation and initial assessment, (2) training and mentoring, and (3) evaluation and follow-up. The results indicate significant improvement in the administrators' understanding and skills in basic accounting, cash management, and financial reporting, along with increased awareness of transparency and accountability. Moreover, this mentoring strengthened BUMDes as a strategic institution to promote village economic independence. Based on these findings, it is recommended to conduct routine training, digitalize financial reporting systems, enhance community participation, and strengthen regulatory support from village authorities and related institutions.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Muhammad Husni, et al (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pemuda melalui Penguatan Akuntabilitas Keuangan BUMDes, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3167>

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Secara potensial, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal apabila dikelola secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip *good governance* (Ardiyansyah & Pesudo, 2022; Husni et al., 2023). Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan aset desa, karena ketiga aspek ini saling terkait dalam menjamin pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Handayani & Abrellian, 2025; Kamarudin et al., 2025; Puspitasari & Adi, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi BUMDes dan praktik pengelolaannya. Di Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2023 terdapat 124 BUMDes yang telah terbentuk dari total 130 desa. Dari jumlah tersebut, baru 56 BUMDes yang berhasil memperoleh sertifikat pendaftaran badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian BUMDes belum memiliki legalitas yang kuat, sehingga berpotensi menghadapi kendala dalam akses pembiayaan, kemitraan, maupun penguatan tata kelola. Dengan kondisi tersebut, diharapkan BUMDes dapat semakin berdaya saing dan berkembang melalui sinergi serta kolaborasi yang intensif antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan berbagai pihak menjadi kunci untuk mempercepat akselerasi legalitas, profesionalisme pengelolaan, dan keberlanjutan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni masih menghadapi sejumlah kelemahan, terutama dalam hal kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap standar pengelolaan dan akuntansi, serta konsistensi pelaporan keuangan sesuai regulasi (Purba, 2021). Kondisi ini mencerminkan fenomena yang juga terjadi pada banyak BUMDes lainnya, di mana meskipun BUMDes telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi desa, kualitas tata kelola keuangan belum sepenuhnya optimal. Meskipun banyak BUMDes telah berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi desa, masih ditemukan kelemahan dalam kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta konsistensi pelaporan keuangan sesuai regulasi (Handayani & Abrellian, 2025; Puspitasari & Adi, 2023). Kondisi ini menimbulkan risiko rendahnya kepercayaan publik, lemahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan dana desa (Husni et al., 2023). Dengan demikian, urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memperkuat sistem akuntabilitas keuangan BUMDes sebagai fondasi tata kelola yang sehat.

Selain itu, adopsi prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, evaluasi berkala dibuktikan mampu menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program desa (Handayani & Abrellian, 2025; Kamarudin et al., 2025). Artinya, permasalahan BUMDes bukan hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan tata kelola. Pada konteks solusi, berbagai alternatif telah diusulkan seperti (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (2) penegakan regulasi dan standar akuntansi; (3) pendampingan kelembagaan; dan (4) penerapan teknologi informasi (TI). Penerapan TI khususnya dianggap lebih adaptif dan efektif, karena aplikasi keuangan berbasis website dan dokumentasi digital dapat meningkatkan efisiensi, monitoring real-time, transparansi, dan kemudahan akses informasi bagi pemangku kepentingan desa (Dananjaya, 2023; Ismiyah, 2020). Dengan dukungan TI, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mudah dipahami, sehingga memperkuat legitimasi BUMDes di mata pemerintah maupun mitra pembiayaan (Hardiyono & Tikupadang, 2023; Puspitasari & Adi, 2023).

Namun, solusi TI hanya akan efektif jika diintegrasikan dengan SDM yang kompeten, penerapan standar akuntansi yang jelas, dan mekanisme partisipasi publik yang kuat. Oleh karena itu, solusi komprehensif yang dipilih dalam penelitian ini adalah penguatan akuntabilitas keuangan BUMDes melalui sinergi antara kapasitas SDM, penerapan standar akuntansi, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi informasi. Tujuan utama pengabdian ini adalah melakukan pendampingan langsung kepada BUMDes, baik dalam aspek teknis pengelolaan keuangan maupun penguatan tata kelola, agar mereka mampu mengimplementasikan prinsip akuntabilitas secara konsisten dan berkelanjutan. Fokus

pendampingan ini tidak hanya membantu BUMDes memahami regulasi dan sistem pelaporan, tetapi juga membangun kapasitas manajerial dan kelembagaan secara praktis.

Pendekatan integratif ini diyakini mampu menjawab persoalan mendasar BUMDes secara lebih struktural dan berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan dinamika terkini dalam pengelolaan keuangan desa dan perkembangan kebijakan pemerintah sebagaimana tercermin dalam berbagai penelitian (Handayani & Abrellian, 2025; Kamarudin et al., 2025; Pasaribu et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa isu akuntabilitas keuangan BUMDes masih aktual, strategis, dan membutuhkan kajian serta intervensi lapangan yang lebih mendalam untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi urgent dan signifikan karena berupaya menjembatani kesenjangan antara potensi ekonomi desa dan lemahnya praktik akuntabilitas BUMDes. Penelitian pengabdian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menawarkan dan menerapkan kerangka solusi integratif berbasis tata kelola, standar akuntansi, partisipasi, teknologi informasi, dan pendampingan langsung sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan.

## **METODE**

Pengabdian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari subjek penelitian sesuai dengan lingkungan alami di lapangan. Peneliti juga menggunakan metode ini karena mereka ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana suatu kelompok melakukan hal-hal untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, sehingga dapat diungkap dengan jelas (Rachmawati, 2017).

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat positivisme, diterapkan untuk meneliti objek dalam keadaan alami (berbeda dengan metode eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, penggabungan data dilakukan melalui triangulasi, dan analisis data dijalankan secara induktif atau bersifat kualitatif. Hasil penelitian diperoleh melalui penerapan metode kualitatif ini.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertempat desa pemuda kecamatan pelaihari, adapun metode yang gunakan untuk menyelesaikan pelaksanaan program ini sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah  
Peserta pengabdian masyarakat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada Bumdes terakait potensi penguatan ekonomi Bumdes di kantor desa pemuda
2. Sosialisasi  
Kepala desa, perangkat desa, serta pengelola BUMDes hadir dalam sosialisasi kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh tim. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tujuan dan mempermudah koordinasi serta kerjasama antara tim pengabdian dengan mitra.
3. Pendampingan dan Pelatihan  
Melakukan kegiatan pendampingan berupa pendampingan Laporan Keuangan dan simulasi sesuai dengan kaidah akuntansi sesuai standar yang berlaku
4. Melaksanakan kegiatan pasca-pendampingan dengan melakukan peninjauan serta monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 di Kantor Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan akuntabilitas keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan kegiatan mengedepankan prinsip partisipasi aktif dengan pendekatan *learning by doing*, di mana peserta tidak hanya memperoleh materi secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik penyusunan laporan keuangan dan pencatatan transaksi BUMDes. BUMDes diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal yang profesional dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan pada hari tersebut mencakup beberapa sesi, yaitu pembukaan, pendampingan sebagai kegiatan inti, serta penutupan. Sesi pembukaan acara dibuka oleh Kepala Desa Pemuda.

### ***Hasil Kegiatan***

Pada sesi pendampingan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) Tahap Persiapan dan Asesmen Awal, (2) Tahap Pelatihan dan Pendampingan, (3) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut. Adapun hasil utama yang dicapai pada setiap tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Tahap Persiapan dan Asesmen Awal**

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes, termasuk mekanisme pencatatan transaksi, penyusunan pelaporan, serta transparansi terhadap masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan maupun potensi perbaikan dalam praktik administrasi keuangan yang telah berjalan. Selain itu, asesmen awal juga berfungsi sebagai dasar dalam merancang strategi peningkatan kapasitas pengurus BUMDes agar mampu menerapkan prinsip akuntabilitas publik secara konsisten. Dengan demikian, tahap ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya pengelolaan keuangan BUMDes yang tertib, transparan, serta mampu mendorong kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan ekonomi lokal.

#### **Tahap Pelatihan dan Pendampingan**

Tahap ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Kegiatan ini mencakup pelatihan akuntansi sederhana, manajemen kas, serta penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Melalui pelatihan tersebut, para peserta dibekali pemahaman praktis mengenai pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif dan partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, serta tokoh masyarakat. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembinaan berkelanjutan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam operasional BUMDes. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu, sehingga BUMDes mampu mengelola keuangannya secara mandiri, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat desa.

#### **Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta mengenai materi pendampingan, khususnya terkait penerapan akuntansi sederhana, manajemen kas, serta penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas dan transparansi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi penguatan sistem pelaporan keuangan yang berkelanjutan, baik dari aspek prosedural maupun kelembagaan. Rekomendasi tersebut mencakup upaya peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, penyempurnaan mekanisme pelaporan, serta penguatan koordinasi antara BUMDes dan pemerintah desa. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian akhir, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan praktik tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.



**Gambar 1.** Penyampaian materi mengenai BUMDes



**Gambar 2.** Diskusi dan tanya jawab dengan perangkat BUMDes

#### **Pembahasan**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyampaian edukasi secara kontekstual dan berbasis praktik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kemampuan keuangan para pengurus BUMDes **Penguatan SDM dan Kompetensi.**

Sebagian besar BUM Desa masih belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga menimbulkan kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana maupun kegiatan operasionalnya. Di desa Pemuda, pelatihan yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan

pemahaman para pengurus BUMDes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan lebih rapi dan sesuai aturan. Para pengurus mulai mampu membuat laporan keuangan yang lebih tertib dan mudah dipahami. Namun, agar kemampuan ini terus terjaga, diperlukan pendampingan lanjutan dan pelatihan ulang secara berkala. Kegiatan pendampingan ini penting agar para pengurus BUMDes selalu mengikuti perkembangan aturan dan praktik akuntansi yang berlaku. Dengan begitu, pengelolaan keuangan BUMDes akan semakin transparan dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Pemuda.

#### **Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi.**

Sistem kontrol internal memberi kerangka agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur. Transparansi kepada masyarakat menjadi elemen penting dalam akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa banyak BUMDes belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat (Kalangie et al., 2023). Di Desa Pemuda pelaksanaan mekanisme transparansi (misalnya papan informasi, rapat desa) mulai berjalan tetapi masih dapat diperkuat melalui digitalisasi laporan keuangan atau aplikasi sederhana. Digitalisasi ini dinilai sebagai langkah krusial untuk memperkuat akuntabilitas Bumdes di desa pemuda.

#### **Hubungan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**

Penguatan akuntabilitas keuangan BUMDes terbukti membuka ruang bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan sistem keuangan yang lebih tertata, BUMDes dapat memperluas unit usaha, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, dan menerapkan pembagian manfaat yang lebih transparan.

#### **Hambatan yang Dihadapi.**

Beberapa hambatan yang muncul dalam pengabdian:

1. Rendahnya literasi keuangan dan akuntansi pengurus BUMDes.
2. Minimnya fasilitas teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan.
3. Prosedur birokrasi dan aturan desa yang masih kaku serta belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan operasional BUMDes.
4. Partisipasi masyarakat yang masih rendah karena kurangnya kepercayaan atau kurangnya informasi.

#### **Rekomendasi**

Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan akuntabilitas BUMDes, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pengurus BUMDes untuk meningkatkan kemampuan, terutama dalam hal akuntansi dasar, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian internal.
2. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mudah digunakan tetapi tetap sesuai standar, serta mulai menerapkan sistem digital dengan aplikasi lokal bila memungkinkan.
3. Meningkatkan keterbukaan dengan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat desa melalui rapat desa, papan informasi, situs web, atau media sosial desa.
4. Mendorong masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan BUMDes, baik dalam pengambilan keputusan, pengawasan pengelolaan keuangan, maupun dalam pemanfaatan hasil usaha.
5. Memastikan adanya dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga terkait agar BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat serta sistem pengelolaan yang baik.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tingkat akuntabilitas keuangan BUMDes sebagai ukuran keberhasilan program.

### **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari pada 18 September 2025 memberikan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes terkait pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan partisipatif serta metode pembelajaran berbasis praktik langsung (*learning by doing*), para peserta tidak hanya memahami konsep dasar akuntansi desa, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan dan pencatatan transaksi secara lebih teratur dan sistematis.

Rangkaian kegiatan yang meliputi asesmen awal, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi dan tindak lanjut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap pentingnya akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan yang baik. Pengurus BUMDes memperlihatkan

kemajuan pada aspek keterampilan teknis pencatatan dan pelaporan, disertai dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam setiap aktivitas keuangan.

Lebih dari itu, program ini turut berkontribusi pada penguatan kelembagaan BUMDes sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi desa. Melalui pendampingan berkelanjutan, BUMDes diharapkan dapat mengelola potensi lokal secara profesional, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan berperan aktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kapasitas pengurus serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan BUMDes, sekaligus menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi yang menjadi pondasi utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Pemuda.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada:

1. Kepala Desa Pemuda beserta perangkat desa, atas dukungan dan kerjasamanya selama pelaksanaan kegiatan.
2. Pengurus BUMDes Desa Pemuda, yang telah aktif berpartisipasi dan antusias dalam setiap tahapan pelatihan dan pendampingan.
3. Tokoh masyarakat dan seluruh warga Desa Pemuda, atas perhatian, dukungan, dan partisipasinya dalam mensukseskan kegiatan ini.
4. Rekan-rekan tim pengabdian, yang telah bekerja sama secara profesional sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Semoga semua upaya dan dukungan yang diberikan dapat membawa manfaat nyata bagi penguatan akuntabilitas keuangan BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Pemuda.

### REFERENSI

- Ardiyansyah, C., & Pesudo, D. (2022). Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Dan Akuntabilitas Bumdes. *Dekat*, 1(2), 38–55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Dananjaya, M. W. P. (2023). Perancangan Antarmuka Aplikasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Website Menggunakan Metode Five Planes. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(3). <https://doi.org/10.36002/jutik.v9i3.2514>
- Handayani, N., & Abrellian, J. R. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)*, 4(1). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i2.7251>
- Hardiyono, H., & Tikupadang, W. K. (2023). UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN EDUPRENEURSHIP DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LEMBANG PARINDING. *Ijes*, 1(1). <https://doi.org/10.63828/ijes.v1i1.30>
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Ismiyah, E. (2020). PENTINGNYA PENCATATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BANTENGPUTHI. *Dedikasimu Journal of Community Service*, 2(2), 346. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v2i2.1431>
- Kalangie, R. J., Sampe, S., & Kumayas, N. (2023). Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 3(2), 12–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/52509>
- Kamarudin, S. F., Killay, T., & Tanody, V. N. (2025). Pengaruh Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pulau Moa). *Kupna*, 6(1), 54–62. <https://doi.org/10.30598/kupna.v6.i1.p54-62>
- Pasaribu, P. N. P., Nuri, H., Arsyah, M., & Mariana, M. (2024). Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan

Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Efektif. *Ekalaya*, 2(4), 1–8. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1375>

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (n.d.). *BUMDes Diharapkan Dapat Lebih Bersaing dan Maju*.

Purba, S. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Famohouni Di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.887>

Puspitasari, M., & Adi, P. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 21–41. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p21-41>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Alfabeta.